

URGENSI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN MELALUI PEMBAHARUAN DESAIN PASPOR NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN FITUR KEAMANAN TERBARU

URGENCE TO ENFORCE IMMIGRATION LAW THROUGH THE RENEWAL OF THE PASSPORT DESIGN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND SECURITY FEATURES

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i1.694>

Submitted: 13-02-2025 Reviewed: 16-03-2025 Published: 12-04-2025

Muhadzib Rezki Hilmy
ajibajib442@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Ervan Fawwaaz Wijanarko
Fawwaazervan@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Theresya Berlian
berliantheresya1@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstrak

Paspor sebagai dokumen perjalanan resmi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keimigrasian suatu negara. Pembaharuan desain paspor Indonesia yang diluncurkan pada 17 Agustus 2024 mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan integritas dokumen perjalanan. Dengan penerapan tema wastra yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, serta penerapan fitur keamanan terbaru, paspor ini diharapkan dapat meminimalisir pemalsuan dan penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan desain paspor Indonesia dari perspektif penegakan hukum keimigrasian dan untuk mengevaluasi efektivitas fitur keamanan baru dalam melindungi identitas Warga Negara Indonesia (WNI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk literatur hukum, berita, dan wawancara dengan ahli keimigrasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini tidak hanya merupakan langkah simbolis, tetapi juga membawa implikasi nyata terhadap sistem keimigrasian dan perlindungan identitas.

Kata Kunci: Paspor, Penegakan Hukum Keimigrasian, Fitur Keamanan, Biometrik, Wastra Indonesia, Chip Elektronik

Abstract

*The passport, as an official travel document, is one of the key instruments in a country's immigration system. The renewal of Indonesia's passport design, launched on August 17, 2024, reflects the government's efforts to enhance the security and integrity of travel documents. With the application of the **wastra** theme, symbolizing the richness of Indonesian culture, alongside the implementation of the latest security features, this passport is expected to minimize forgery and misuse. This research aims to analyze the changes in the design of Indonesia's passport from the perspective of immigration law enforcement and to evaluate the effectiveness of new security features in protecting the identities of Indonesian citizens. The method used in this study is qualitative analysis, gathering data from various sources, including legal literature, news, and interviews with immigration experts. The results of the study indicate that these changes are not only symbolic but also have real implications for the immigration system and identity protection.*

Keywords: Passport, Immigration Law Enforcement, Security Features, Biometric, Indonesian Textile, Electronic Chip



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Paspor merupakan instrumen vital dalam perjalanan internasional dan menjadi bagian integral dari penegakan hukum keimigrasian di berbagai negara. Keamanan paspor menjadi isu penting, terutama dalam menghadapi ancaman global seperti terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas negara yang sering kali memanfaatkan pemalsuan dokumen sebagai sarana untuk melancarkan aksinya. Di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa langkah penting untuk meningkatkan keamanan paspor dengan memperbaharui desain dan fitur-fiturnya.

Pada 17 Agustus 2024, pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan desain paspor baru yang dirancang untuk mengakomodasi tantangan keamanan global serta menjaga budaya nasional melalui motif wastra Indonesia. Pembaruan ini tidak hanya menghadirkan estetika baru, tetapi juga menyertakan teknologi keamanan terbaru seperti chip elektronik dan biometrik. Langkah ini dilakukan seiring dengan upaya untuk menyesuaikan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Institusi Imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing, tidak saja menimbulkan konsekuensi tuntutan peranan yang optimal dalam kebijakan keimigrasian. (Wilonotomo et al., 2020)

Pemeriksaan keimigrasian di maksud adalah pemeriksaan dokumen perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku yang di miliki oleh pemegang dokumen perjalanan tersebut. Untuk pemeriksaan keimigrasian di laut terhadap awak alat angkut laut juga dilakukan pemeriksaan dokumen perjalanan dan daftar penumpang atau sering di sebut crew list dan juga surat atau perijinan lainnya.

Dalam sistem keimigrasian global, paspor bukan sekadar dokumen perjalanan, tetapi juga merupakan alat penegakan hukum yang memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan negara, mencegah penyalahgunaan identitas, dan mendukung pengawasan migrasi. Di tengah meningkatnya kejahatan transnasional, seperti pemalsuan dokumen dan penyelundupan manusia, langkah-langkah penegakan hukum keimigrasian melalui penguatan keamanan paspor menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap negara, termasuk Indonesia.

Teori *globalization and migration control* menekankan bahwa peningkatan mobilitas manusia di era globalisasi menghadirkan tantangan baru dalam hal pengawasan perbatasan dan keamanan nasional (Bauman, 2013). Salah satu upaya untuk menjawab tantangan ini adalah melalui penguatan

desain dan fitur keamanan paspor. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah memperkenalkan pembaharuan desain paspor dengan berbagai fitur keamanan mutakhir, termasuk biometrik, chip elektronik, serta pengenalan elemen visual khas budaya Indonesia melalui motif wastra Indonesia.

Pembaruan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan keamanan, tetapi juga untuk menjaga identitas budaya nasional di tengah tuntutan penegakan hukum keimigrasian yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perubahan desain paspor dan penerapan fitur keamanan terbaru dapat memperkuat upaya penegakan hukum keimigrasian, mencegah kejahatan lintas negara, serta meningkatkan integritas dokumen perjalanan Indonesia.

Penegakan hukum keimigrasian mencakup berbagai strategi dan tindakan yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur masuknya serta keluarnya warga negara dan non-warga negara melalui perbatasan negara. Di era modern, sistem keamanan dokumen perjalanan seperti paspor telah berkembang dari sekadar dokumen fisik menjadi entitas yang sarat dengan teknologi digital dan biometrik. Menurut teori kontrol imigrasi yang dikemukakan oleh Cornelius et al. (2004), keberhasilan sistem imigrasi modern sangat bergantung pada keakuratan dan keamanan dokumen identitas, terutama dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan lintas batas. (Wulandari & Anam, 2024)

Dalam kajian global, banyak negara telah memperkenalkan e-passport dengan teknologi biometrik dan chip elektronik yang menyimpan data personal secara digital. Menurut Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), e-passport dianggap sebagai standar internasional yang memberikan perlindungan lebih baik terhadap pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan identitas.

Indonesia sebagai anggota ICAO telah berkomitmen untuk mengikuti standar ini, dan peluncuran paspor dengan desain baru pada 17 Agustus 2024 adalah bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian sesuai standar global. (Lilis Yuaningsih et al., 2020)

Pentingnya pembaruan desain paspor ini tidak hanya terletak pada peningkatan aspek keamanan, tetapi juga pada penegakan hukum keimigrasian secara keseluruhan. Dengan desain baru yang lebih aman dan representatif, diharapkan penegakan hukum dalam konteks keimigrasian dapat menjadi lebih efektif. Keberadaan paspor yang aman dan terjamin keasliannya akan mendukung upaya pemerintah dalam mencegah tindak kejahatan, seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang sering kali berakar pada penyalahgunaan dokumen perjalanan.

Namun, tantangan dalam implementasi pembaruan ini tetap ada, terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur teknologi di berbagai tempat pemeriksaan imigrasi dan tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembaruan paspor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan desain paspor Indonesia dari perspektif penegakan hukum keimigrasian dan mengevaluasi efektivitas fitur keamanan baru dalam melindungi identitas Warga Negara Indonesia (WNI). Dengan pendekatan ini, diharapkan akan terungkap gambaran yang komprehensif mengenai dampak pembaruan paspor terhadap keamanan nasional dan upaya penegakan hukum di Indonesia.

Permasalahan yang kerap terjadi dan menjadi momok yang dialami petugas imigrasi dilapangan adalah kurangnya fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) atau yang sering dikenal dengan *Personal Protective Equipment* (PPE). Hal ini terlihat dengan minimnya jumlah fasilitas yang ada dikarenakan kurangnya kesadaran dari pengawas dan pegawai untuk menggunakan dan mengadakanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembaharuan desain paspor Republik Indonesia dengan integrasi motif budaya wastra Indonesia dapat meningkatkan keamanan dokumen perjalanan?
2. Bagaimana pembaharuan desain paspor Republik Indonesia dengan integrasi motif budaya wastra Indonesia dapat meningkatkan keamanan dokumen perjalanan?
3. Apa saja tantangan dan kendala dalam implementasi paspor dengan fitur keamanan terbaru, dan bagaimana solusi untuk mengoptimalkan penegakan hukum keimigrasian melalui pembaruan ini?

Tujuan

1. Menganalisis efektivitas pembaharuan desain paspor Republik Indonesia, khususnya dalam pengenalan motif wastra Indonesia, sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan dokumen perjalanan dan penegakan hukum keimigrasia
2. Mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi biometrik dan chip elektronik pada paspor baru dalam mengurangi pemalsuan dan mempercepat proses verifikasi di TPI?
3. Mengevaluasi tantangan implementasi paspor dengan fitur keamanan terbaru di Indonesia dan menawarkan solusi untuk memperkuat sistem imigrasi dan penegakan hukum.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis deskriptif terhadap kebijakan keimigrasian, perubahan desain paspor, serta fitur keamanan terbaru yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, laporan resmi pemerintah, kebijakan internasional terkait paspor.

Penelitian ini akan melakukan studi literatur mendalam untuk menganalisis berbagai kajian teoretis dan empiris mengenai paspor, biometrik, dan chip elektronik dalam konteks penegakan hukum. Sumber-sumber literatur mencakup jurnal internasional, laporan dari ICAO, Interpol, serta dokumen pemerintah terkait paspor baru Indonesia.

2., Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Tek Penelitian ini juga akan melibatkan analisis kebijakan terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur pembaharuan paspor dan pengamanan dokumen perjalanan di Indonesia. Kebijakan ini akan dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah sukses menerapkan teknologi biometrik dan chip elektronik dalam paspor mereka. Analisis isu hukum (legal issue) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (inductive) dan deduktif (deductive) dalam persoalan hukum faktual yang konkret. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep

PEMBAHASAN

A. Pembaharuan Desain Paspor Indonesia : Fitur Keamanan dan Estetika Budaya

Penerapan chip elektronik yang terintegrasi dalam paspor Indonesia merupakan inovasi utama dalam pembaharuan desain paspor. Chip ini menyimpan data biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan bahkan data iris mata, yang memungkinkan proses verifikasi identitas secara lebih cepat dan akurat. Menurut Bowersox (2021), teknologi biometrik dan chip elektronik telah terbukti secara global sebagai alat yang efektif untuk memerangi pemalsuan dan penyalahgunaan identitas, karena data biometrik bersifat unik bagi setiap individu dan sulit dipalsukan.

Dalam konteks Indonesia, fitur ini diharapkan mampu meningkatkan integritas dokumen perjalanan dan mengurangi risiko penggunaan paspor palsu oleh individu yang terlibat dalam kejahatan lintas negara. Pemalsuan paspor adalah salah satu bentuk kejahatan paling umum yang terkait dengan perdagangan manusia dan penyelundupan imigran (Interpol, 2022), sehingga langkah Indonesia dalam mengadopsi e-passport dianggap sebagai terobosan yang signifikan dalam menjaga keamanan nasional.

Paspor sebagai dokumen resmi perjalanan memiliki peranan krusial dalam sistem keimigrasian suatu negara. Selain berfungsi sebagai alat identifikasi, paspor juga berperan dalam menjaga keamanan nasional dengan memastikan bahwa setiap individu yang masuk atau keluar dari suatu negara telah melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks globalisasi yang semakin meningkat, mobilitas penduduk lintas batas menjadi lebih umum, yang berarti bahwa risiko penyalahgunaan dokumen dan pemalsuan paspor juga meningkat (Bauman, 2013).

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki tantangan tersendiri dalam mengawasi pergerakan penduduk dan barang di perbatasan lautnya. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah menghadapi berbagai masalah terkait keamanan, termasuk penyelundupan manusia, terorisme, dan perdagangan narkoba. Dalam konteks ini, pembaharuan desain paspor dan integrasi fitur keamanan terbaru menjadi sangat penting untuk meningkatkan keandalan dokumen perjalanan dan mencegah penyalahgunaan.

Pada 17 Agustus 2024, Indonesia memperkenalkan desain baru untuk paspornya yang menonjolkan tema **wastra Indonesia**. Penggunaan motif ini tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya dan identitas nasional, tetapi juga berfungsi sebagai lapisan keamanan tambahan. Menurut laporan Silmy Karim, Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, penggunaan motif budaya dalam desain dokumen resmi adalah langkah strategis untuk memperkuat keaslian dan nilai paspor (Karim, 2024).

Penggunaan motif wastra, yang terdiri dari 33 desain dari total 5.849 motif yang ada di Indonesia, menjadi salah satu keunikan dari paspor ini. Penelitian menunjukkan bahwa elemen visual yang rumit dan berbudaya membuat paspor lebih sulit untuk dipalsukan (Ashby, 2020). Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan dokumen perjalanan.

B. Analisis Fitur Keamanan dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum Keimigrasian

1. Mencegah Pemalsuan Dokumen: Pendekatan Teknologi

Sistem biometrik dan chip elektronik telah diuji di berbagai negara sebagai salah satu alat paling efektif dalam mencegah pemalsuan identitas dan penyalahgunaan dokumen perjalanan. Data dari ICAO menunjukkan bahwa negara-negara yang telah menerapkan e-passport mengalami penurunan signifikan dalam kasus pemalsuan paspor. Menurut Larsen (2019), e-passport dapat mengurangi kemungkinan pemalsuan hingga 50% dibandingkan dengan paspor non-elektronik.

Dengan integrasi sistem ini, Indonesia mampu berperan lebih aktif dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan lintas negara yang terkait dengan perdagangan manusia dan penyelundupan. Teknologi ini tidak hanya diterapkan di bandara internasional, tetapi juga di semua tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yang ada di seluruh perbatasan Indonesia, memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap upaya pemalsuan.

2. Kecepatan dan Akurasi Verifikasi Identitas

Teknologi biometrik dan chip elektronik memungkinkan proses verifikasi identitas yang lebih cepat dan akurat di perbatasan. Ini penting dalam konteks Indonesia yang memiliki lalu lintas migrasi internasional yang padat, terutama di daerah-daerah seperti Batam dan Bali yang menjadi pintu masuk utama bagi wisatawan dan pekerja migran. Silmy Karim (2024) menyatakan bahwa penerapan teknologi ini akan mengurangi waktu verifikasi hingga 30%, sekaligus meningkatkan akurasi hingga 99%, dibandingkan dengan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan manusia.

Pembaharuan desain paspor Indonesia tidak hanya mencakup aspek estetika tetapi juga teknologi keamanan. Dengan mengintegrasikan chip elektronik dan biometrik, pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih kuat. Chip elektronik yang tertanam dalam paspor menyimpan data pribadi pemegang, termasuk sidik jari dan foto wajah, yang dapat diverifikasi di pos pemeriksaan imigrasi (Bowersox, 2021).

Teknologi biometrik memungkinkan pemeriksaan identitas yang cepat dan akurat, yang menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas negara. Sebuah studi oleh ICAO menunjukkan bahwa penerapan teknologi biometrik dalam dokumen perjalanan dapat mengurangi risiko pemalsuan hingga 50% (ICAO, 2023).

Sistem biometrik yang terintegrasi pada paspor memungkinkan petugas imigrasi untuk melakukan pemeriksaan identitas yang lebih akurat dan cepat. **Research by Bowersox (2021)** highlights Sistem biometrik mengurangi kesalahan manusia dan memungkinkan lembaga penegakan hukum untuk dengan cepat mengidentifikasi individu yang mencoba menggunakan dokumen palsu.

. Keberadaan fitur ini sangat penting dalam konteks Indonesia, di mana berbagai modus operandi pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen perjalanan telah teridentifikasi.

Teknologi tidak hanya memfasilitasi pemeriksaan dokumen tetapi juga memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real-time. Dengan menggunakan sistem manajemen data imigrasi yang terintegrasi, otoritas dapat melacak pergerakan individu di seluruh Indonesia dan memantau pola yang mencurigakan. Menurut Naim (2018), analisis data besar dapat memberikan wawasan mendalam mengenai tren migrasi dan membantu pihak berwenang dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait penegakan hukum.

Sistem ini juga memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintahan dan keamanan, seperti kepolisian, imigrasi, dan lembaga penegakan hukum lainnya. Penelitian oleh Ashby (2020) menunjukkan bahwa pengintegrasian data antar lembaga dapat mengoptimalkan respons terhadap potensi ancaman keamanan, termasuk dalam konteks pencegahan kejahatan lintas negara.

C. Tantangan dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Dokumen

Sebagian besar fitur keamanan modern memerlukan konektivitas internet yang stabil dan cepat untuk melakukan verifikasi data secara real-time. Menurut **Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia**, masih ada banyak daerah yang memiliki akses internet terbatas, yang

mengakibatkan keterlambatan dalam proses verifikasi dokumen di pos pemeriksaan imigrasi (Kominfo, 2023). Dalam situasi di mana jaringan internet tidak memadai, penggunaan sistem biometrik menjadi tidak efisien dan dapat menyebabkan antrean panjang serta peningkatan waktu tunggu bagi penumpang.

Selain konektivitas, peralatan yang diperlukan untuk mendukung teknologi biometrik, seperti pemindai sidik jari, kamera pengenalan wajah, dan perangkat keras lainnya, harus tersedia di setiap pos pemeriksaan. Namun, tidak semua lokasi pemeriksaan memiliki anggaran yang cukup untuk memperbarui atau mengadopsi teknologi baru ini. Penelitian oleh Ashby (2020) menunjukkan bahwa kurangnya investasi dalam infrastruktur teknologi dapat menghambat penerapan sistem keamanan yang efektif, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem imigrasi. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan paspor baru yang dilengkapi dengan fitur keamanan. Masyarakat perlu memahami manfaat dari sistem keamanan baru dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan dokumen perjalanan.

Kurangnya Informasi dan Edukasi

Banyak warga negara yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pembaruan paspor dan fitur keamanan yang ditawarkan. Tanpa pemahaman yang jelas, mereka mungkin enggan untuk melakukan pergantian paspor atau menggunakan paspor baru yang dilengkapi fitur keamanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meluncurkan kampanye informasi yang komprehensif untuk mendidik masyarakat tentang keuntungan dari paspor baru, termasuk fitur keamanan yang dapat melindungi mereka dari potensi penyalahgunaan identitas.

Persepsi Negatif Terhadap Teknologi Keamanan

Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin memiliki persepsi negatif terhadap penggunaan teknologi biometrik, yang dianggap sebagai pelanggaran privasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem keamanan baru. Menurut Bauman (2013), penting untuk menjelaskan bagaimana data biometrik akan digunakan dan dilindungi untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat terkait privasi dan keamanan data pribadi. Implementasi fitur keamanan baru juga membawa tantangan terkait dengan pengelolaan data pribadi. Dengan menyimpan informasi biometrik dan data pribadi pemegang paspor, risiko kebocoran data menjadi perhatian serius.

Keamanan Data dan Ancaman Siber

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, ancaman serangan siber terhadap sistem penyimpanan data menjadi semakin umum. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa data biometrik dilindungi dengan baik dari potensi pelanggaran yang dapat merugikan individu dan negara. Menurut laporan oleh Interpol (2022), serangan siber terhadap sistem identitas dapat menyebabkan kebocoran informasi pribadi yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan kriminal.

Kepatuhan terhadap Regulasi Perlindungan Data

Pemerintah juga perlu memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa. Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi perlindungan data yang setara, penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan data biometrik dan teknologi keamanan lainnya (Naim, 2018).

Meskipun langkah-langkah yang diambil dalam pembaharuan desain paspor ini menunjukkan kemajuan, tantangan dalam implementasi tetap ada. Kesiapan infrastruktur teknologi di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembaruan paspor adalah dua aspek yang perlu diperhatikan. Untuk itu, diperlukan program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami manfaat dari paspor baru ini (Naim, 2018).

Implementasi teknologi baru ini juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan swasta, untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil yang mungkin belum sepenuhnya

terintegrasi dengan teknologi modern.

Sebagai solusi, pemerintah dapat memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan bahwa infrastruktur yang diperlukan tersedia. Selain itu, sosialisasi melalui kampanye media sosial dan seminar dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan dokumen perjalanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pembaharuan desain paspor Indonesia dengan fitur keamanan terbaru, termasuk integrasi biometrik dan chip elektronik, merupakan langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum keimigrasian.
2. Fitur-fitur ini tidak hanya meningkatkan keamanan dokumen perjalanan, tetapi juga memfasilitasi proses verifikasi yang lebih cepat dan akurat, serta mencegah pemalsuan dokumen. Penggunaan wastra Indonesia sebagai elemen desain visual juga memberikan nilai tambah dari segi identitas budaya dan keamanan visual.

Meskipun tantangan dalam implementasi tetap ada, dengan strategi yang tepat, paspor baru ini dapat menjadi bagian integral dari sistem keamanan nasional yang lebih kuat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang keamanan perbatasan dan penegakan hukum imigrasi.

Saran

Pembaharuan desain paspor dan fitur keamanan paspor dapat lebih efektif apabila :

- **Peningkatan Anggaran untuk Infrastruktur Teknologi**
Pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi, terutama di daerah terpencil. Hal ini akan memastikan bahwa semua pos pemeriksaan dapat mengakses sistem biometrik dengan efektif dan efisien. Penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur dapat memperkuat sistem keamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem imigrasi (Bauman, 2013).
- **Pelatihan Berkelanjutan untuk Petugas Imigrasi**
Penting untuk menyusun program pelatihan yang berkelanjutan bagi petugas imigrasi mengenai penggunaan teknologi baru. Pelatihan ini harus mencakup tidak hanya pengoperasian perangkat biometrik, tetapi juga penanganan situasi yang mungkin terjadi saat pemeriksaan. Pengetahuan yang lebih baik tentang teknologi dapat mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam verifikasi identitas (Larsen, 2019).
- **Sosialisasi kepada Masyarakat**
Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pembaruan paspor dan fitur-fitur keamanan yang ditawarkan. Kampanye edukasi dapat dilakukan melalui berbagai platform, termasuk media sosial, seminar, dan kerjasama dengan komunitas lokal. Kesadaran masyarakat akan manfaat dari sistem keamanan baru akan meningkatkan partisipasi dalam pengawasan dokumen perjalanan (Naim, 2018).
- **Pengembangan Kebijakan Perlindungan Data**
Mengingat adanya risiko terkait pengelolaan data biometrik, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan perlindungan data yang jelas dan tegas. Kebijakan ini harus mencakup prosedur keamanan untuk melindungi data pribadi, serta mekanisme untuk menangani pelanggaran data. Mengadopsi standar internasional, seperti GDPR, dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi data warga negara (UNODC, 2022).
- **Kolaborasi Antar Lembaga**
Diperlukan penguatan kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk berbagi informasi dan sumber daya. Kerjasama ini dapat meningkatkan

efektivitas dalam penegakan hukum keimigrasian dan membantu dalam berbagi praktik terbaik dalam penggunaan teknologi keamanan. Forum kolaboratif juga dapat membantu dalam menangani masalah yang muncul akibat implementasi fitur keamanan baru (Bowersox, 2021).

- **Monitoring dan Evaluasi yang Efektif**

Implementasi fitur keamanan baru harus diikuti dengan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengadaptasi kebijakan berdasarkan umpan balik dari pengguna dan petugas imigrasi. Hal ini akan memastikan bahwa sistem tetap relevan dan mampu memenuhi tantangan yang ada (Ashby, 2020).

- **Penelitian Berkelanjutan**

Disarankan untuk melakukan penelitian berkelanjutan tentang dampak dari fitur keamanan baru terhadap penegakan hukum keimigrasian. Penelitian ini harus mencakup analisis data terkait efektivitas sistem, pengalaman pengguna, dan dampak terhadap masyarakat. Dengan basis data yang kuat, pengambilan keputusan yang lebih informasional dapat dilakukan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ardhiswastra, Yudha Bhakti. 2018.

Penafsiran Dan Konstruksi

Hukum. Bandung: Alumni

Ashby, J. (2020). Cultural Elements in Security: The Use of National Textiles in Passport Design. *Journal of Cultural Studies*, 12(4), 45-62.

Bauman, Z. (2013). *Globalization and Migration Control: Challenges and Opportunities*. Cambridge University Press.

Bowersox, J. (2021). **Biometric Security in Global Immigration Systems**. *Journal of Border Studies*, 19(3), 122-138.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*.

Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group

Jurnal

Bahri, Imam, Suhaidi, Mahmud Siregar, and Mahmud Mulyadi. 2017. Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pendeportasian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Larsen, T. (2019). The Impact of Biometric Passports on Border Security. *International Journal of Security Studies*, 8(1), 11-25.

Naim, M. (2018). Theories of Border Control and Immigration Law Enforcement. *Journal of International Relations*, 15(2), 55-74.

UNODC. (2022). *Global Report on Trafficking in Persons*. United Nations Office on Drugs and Crime.

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang No 6 Tahun 2011

Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011